

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Baridwan (2006) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun dalam masa periode buku yang bersangkutan.

Menurut Hery, (2009) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Setiap perusahaan pada suatu waktu atau periode tertentu akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan serta ditujukan untuk memenuhi tujuan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004: PSAK 1,2) Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang informasi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan

ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayai kepada mereka.

Menurut Hery (2009:31) tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi infestor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit.

2.2 Pemakai Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda tergantung pada jenis keputusannya yang hendak diambil, para pemakai informasi terbagi kedalam dua kelompok yaitu, pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal adalah pengambil keputusan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan internal perusahaan, yang termasuk dalam golongan ini adalah manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan dewan direksi. Sedang pemakai eksternal merupakan pengambil keputusan yang berada di luar lingkungan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para kreditor, calon kreditor, investor, calon investor, badan pemerintah, masyarakat umum, dan pihak-pihak luar lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Ahmad Riahi Belkoui, (2006).

2.3 Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan pristiwa lain yang dikasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur-unsur laporan keuangan sebagai mana yang telah di rumuskan oleh FSAB dalam SFAC No. 6 adalah sebagai berikut:

1. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu
2. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.
3. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas, yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya.
4. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya.
5. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik
6. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik
7. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama perusahaan.
8. Biaya (*expenses*) adalah alirankeluar atau pemakaian asset suatu entitas, atau penambahan utang suatu entitas (atau kombinasi keduanya) selama satu priode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus menerus.
9. Keuntungan (*gain*) kenaikan ekuitas (asset neto) dari transaksi insidentil suatu entitas dari semua transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu priode diluar transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik
10. Kerugian (*losses*) penurunan ekuitas (asset neto) dari transaksi insidentil suatu entitas dari semua transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu priode diluar transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemilik

2.4 Laporan Keuangan komersial

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar Akuntansi Keuangan yang tujuannya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun komponen-komponen dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Neraca

Neraca adalah suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Unsur-unsur neraca menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI:2009) neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas yang di hubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:

$$\text{Asset} = \text{liabilitas} + \text{ekuitas}$$

- a. Asset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
- b. Kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin terjadi pada masa mendatang, berupa kewajiban suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain pada masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

- c. Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan yang masih adasetelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah selisihantara aktiva dengan kewajiban. Ekuitas dapat diperinci dalam neraca

2.4.2 Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Adapun unsur yang ada dalam laparan laba rugi adalah sebaagi berikut .

- a. Penghasilan (*income*)

Menurut Hery (2009:109) penghasilan adalah arus kas masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau sentral perusahaan.

- b. Beban (*Expences*) adalah arus kas keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi darii keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan

- c. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas(aktiva bersih) yang berasaldari transaksi yang bukan merupakan operasi utama perusahaan atau yangsifatnya insidental dan dari transaksi dimaksud, kejadian serta situasi lainyang mempengaruhi perusahaan, selain yang dihasilkan dari pendapatan atauinvestasi pemilik

- d. Kerugian adalah penurunan ekuitas yang berasal dari transaksi yang bukan merupakan operasi utama atau yang sifatnya insidental dan dari semua transaksi, kejadian, atau situasi lain yang mempengaruhi entitas, selain dari yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

2.5 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang disajikan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada asset neto perusahaan sebagai entitas. Penggunaan konsep, metode, maupun prosedur diperlukan juga dalam perpajakan sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang. Demikian juga dengan laporan keuangan fiskal menggunakan istilah penghasilan dan pengeluaran sebagaimana diatur pada pasal 4 dan 6 undang-undang pajak penghasilan, tetapi untuk jenis pajak lainnya juga akan terlihat dari transaksi keuangan yang dibukukannya, seperti kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) Dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mendefinisikan objek penghasilan sebagai berikut :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk didalam pasal 4 ayat 1 di jelaskan objek penghasilan kedalam tiga kelompok yaitu:

- a. Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karna pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karna pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 2. Keuntungan karna pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karna likuidasi, pengabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengembalian usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
 4. Keuntungan karna pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbagan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dan badankeagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial, termasuk karyawan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha kecil.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayarantambahan pengemblian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karn jaminan pengemblian hutang
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karna pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karna selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karna penilaian kembali aset
- n. Premi asuransi, termasuk premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usahanya atau usahanya atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia (Pardiat , 2010:2)

2.6 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Menurut Waluyo (20010) proses penyusunan laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Pendekatan ini mengharuskan wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelongaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada pendekatan ini terlihat adanya dua perangkat pembukuan, yaitu untuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiskal.

2. Wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuan dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar proses pembukuan, sering disebut sebagai *extra comptable*. Laporan keuangan fiskal ini disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan dari *extra comptable* tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial. Pendekatan ini lebih banyak digunakan sebagai pilihan, yaitu dengan menyusun laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi. Umumnya praktik pembukuan di Indonesia menyusun laporan keuangan fiskal yang disertai dengan rekonsiliasi. Namun ada juga wajib pajak yang hanya menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi komersial tanpa menyusun akuntansi berdasarkan ketentuan perpajakan.
3. Ketentuan perpajakan sebagai sisipan standar Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip *common basis*. Dalam dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka referensi diberikan pada ketentuan perpajakan.

Dari penjelasan di atas laporan keuangan yang harus disusun dengan khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengacu kepada semua peraturan perpajakan, laporan ini dinamakan dengan laporan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat berubah menjadi laporan dengan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan pada saat perhitungan laba kena pajak. Laporan laba rugi fiskal

adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Koreksi Fiskal

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

Menurut Putra (2012) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terbagi kedalam 4 kelompok yaitu :

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip SAK yang telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal antara lain :

- a. Prinsip konservatisme, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- b. Prinsip harga perolehan, dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

- c. Prinsip pemadanan (*matching*), akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.
- 2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
 - a. *Metode penilaian persediaan*
 - b. *Metode penyusutan dan amortisasi*
 - c. *Metode penghapusan piutang*
- 3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- 4. Imbalan dengan jumlah melebihi kewajiban, sesuai dengan pasal 9(1) UU PPh.

2.8 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

a. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena, Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

b. Beda Waktu (*Time Different*)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena, Penerimaan penghasilan *cash basis*

untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Berikut ini akan dikemukakan contoh yang mengakibatkan perbedaan waktu antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan adalah:

a. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha.

Menurut undang-undang perpajakan pasal 11 (6) No. 36 tahun 2008 membagi penyusutan kedalam dua kelompok yaitu, metode garis lurus (*straight Line Method*) dan metode saldo menurun (*Declining Balance Method*), perusahaan dapat memilih salah satu metode yang sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus dan saldo menurun, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Masa manfaat dan tarif penyusutan untuk aktiva tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
A. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10%
B. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	
Tidak permanen	10 Tahun	10%	

Sumber , UU PPh No. 36 Tahun 2008

b. Amortisasi

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, maenagih dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluarantersebut atau atas nilai buku dan mas akhir masa manfaat diamortisasikan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Table. II.2
Masa manfaat dan Tarif Amortisasi harta tak berwujud

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Tariff Amortisasi	
		Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: UU PPh No 36 Tahun 2008

2.9 Biaya-Biaya Yang Boleh Dimasukkan Sebagai Pengurang Berdasarkan

Undang-Undang Perpajakan

Adapun biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh antara lain:

1. Biaya-biaya 3M

Biaya 3M meliputi biaya menagih, memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya perkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

2. Penyusutan dan amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dan pasal 11A UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3. Iuran kepada dana pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan boleh dibebankan sebagai biaya sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh menteri keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian karna penjualan atau pengalihan harta

Kerugian karna penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto.

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijakan pemerintah dibidang moneter dapat dibebankan sebagai biaya. Pembebanan selisih kurs tersebut dapat dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- b. Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan dalam negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat jenderal Pajak.

9. Biaya berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu

Beberapa aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan, maupun penyusutan diperlukan secara khusus, antara lain kepemilikan:

- a. Biaya telepon seluler
- b. Biaya kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya
- c. Biaya kendaraan sedan atau sejenisnya

10. Biaya entertainment dan sejenisnya

Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga dibuat dengan biaya reparasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen pajak No. 27 tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

11. Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Adapun biaya sumbangan yang boleh dikurang dari penghasilan bruto antara lain:

- a. Biaya beasiswa dalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
- b. Bantuan kemanusiaan bencana alam di Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara. (Azhari, 2008:48-58)

2.10 Biaya –Biaya yang Tidak Boleh Sebagai Pengurang Penghasilan dalam UU Perpajakan

Isi dari Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu :

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk sawah kehutanan; dan
 - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;

- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

2.11 Pengertian Biaya Sumbangan

Menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) mengenai biaya sumbangan adalah Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, Sumbangan fasilitas pendidikan, dan Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga ditentukan sebagai berikut :

- a. Dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang .
- b. Dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak sumbangan tersebut diserahkan.
- c. Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan :
 - 1. Nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan.

2. Nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan.
 3. Harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.
- d. Sumbangan dan/atau biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.
 - e. Sumbangan dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak sumbangan tersebut diserahkan.
 - f. Bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2011.

Sumbangan Biaya pembangunan infrastruktur social ditentukan sebagai berikut :

- a. Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.
- b. Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.
- c. Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

- d. Sumbangan dan/atau biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan.
- f. Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, biaya pembangunan infrastruktur sosial dibebankan sekaligus sebagai pengurang penghasilan bruto pada Tahun Pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan,
- g. Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dibiayai oleh lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh masing-masing Wajib Pajak.
- h. Bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2011.

Badan penanggulangan bencana dan/atau lembaga atau pihak yang menerima sumbangan harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap triwulan. Lembaga penerima sumbangan wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.

Laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan oleh badan dan lembaga tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan formulir laporan penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini No.76/PMK.03/2011.

Tabel. II.3
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAUBIAYA
SUMBANGAN

TRIWULAN..../TAHUN PAJAK.....

NO.	Nama/NPWP, Alamat Pemberi Sumbangan dan/atau Biaya....	Jenis Sumbangan dan/atau Biaya		Bulan/Tahun
		Barang*	Jumlah	
Total				

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011

2.12 Pengertian Biaya Entertainment

Biaya entertainment merupakan biaya yang diperuntukan untuk menjamu relasi atau rekanan bisnis perusahaan. Pada dasarnya biaya ini diakui sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sepanjang pengeluaran tersebut sesuai dengan kelaziman dan kewajaran dalam praktek dunia usaha sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Biaya entertainment menjadi pengurang penghasilan bruto jika dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya (seri PPh Umum 18) yang menyebutkan bahwa :

1. Biaya "*entertainment*", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif

Bagi Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif yang berisi :

- a. Nomor urut.
- b. Tanggal "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- c. Nama tempat "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- d. Alamat "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- e. Jenis "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- f. Jumlah (Rp) "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.

g. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :

1. Nama
2. Posisi
3. Nama perusahaan
4. Jenis usaha.

Daftar Nominatif Sebagai Lampiran SPT Tahunan PPh Badan dan PPh

Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan adalah sebagai berikut :

Tabel. II.4

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA

TAHUN PAJAK :

Nomor	Pemberian entertainment dan sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Ket
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011

2.13 Koreksi Positif Negatif

Menurut Damayanti (2009) Koreksi Positif dan Negatif Akibat Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu Dalam menyusun laporan laba rugi fiskal perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Undang-Undang Perpajakan yang mengatur prinsip-prinsip mengenai penyusunan laporan laba rugi fiskal. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, laporan laba rugi komersial yang telah tersedia dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan laba rugi fiskal yang benar.

Perbedaan konsep, cara pengukuran, dan pengakuan penghasilan dan biaya antara ketentuan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan terutang. Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan negatif.

Koreksi fiskal positif adalah koreksi-koreksi yang akan mengakibatkan penambahan Penghasilan Kena Pajak. Pada umumnya koreksi fiskal positif ini berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan (*negative list*). Akibatnya, jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi penghasilan akan semakin kecil dan di lain pihak jumlah Penghasilan Kena Pajaknya akan semakin besar.

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi-koreksi yang dilakukan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan dengan cara mengurangi laba komersial sebesar koreksi negatif tersebut. Hal-hal yang mengakibatkan timbulnya koreksi fiskal negatif adalah, biaya, dan penghasilan.

2.14 Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2011:3) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau kegiatan di Indonesia.

Sedangkan menurut Purwono (2010) pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Ketentuan material pajak penghasilan sebagai besar dimuat dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, perubahan pertama menjadi UU No. 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan, perubahan kedua menjadi UU No. 7 tahun 1994, perubahan ketiga menjadi UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dan perubahan yang terakhir menjadi UU No. 36 tahun 2008.

Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, yang diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 dan di ubah lagi menjadi UU No. 28 tahun 2007.

2.15 Subjek Pajak

Definisi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2.

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - b. Badan
 - c. Bentuk usaha tetap
2. Subjek pajak yang terdiri subjek pajak dalam negeri dan subjek luar negeri
3. Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat, berkedudukan di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
4. Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- c. Yang dimaksud badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- i. Tempat kedudukan manajemen
 - ii. Cabang perusahaan
 - iii. Kantor perwakilan
 - iv. Gedung kantor
 - v. Pabrik
 - vi. Bengkel
 - vii. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan.
 - viii. Perikanan, peternakan, pertanian perkebunan dan kehutanan.
 - ix. Pemberian kerja dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - x. Proyek konstruksi, instalasi, dan proyek perakitan.
 - xi. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukan tidak bebas.

- xii. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

2.16 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Penjabat-penjabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau penjabat-penjabatlain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentuk kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - c. Penjabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.17 Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Penghasilan menurut UU pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan lain-lain.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk:
 - a. Antara pihak-pihak yang bersangkutan, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena penghasilan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan alihan usaha.
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang.
- g. Deviden
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- p. Tambahan kekayaan netto yang bersal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (Waluyo,2009).

2.18 Penghasilan yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atas penghasilan tertentu. UU pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut definisi UU pajak penghasilan suatu penerimaan atau penambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyetaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
 - c. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - d. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
7. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
8. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pendirian izin usaha.
9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia

Pengecualian beberapa jenis penghasilan sebagai objek pajak ini bertujuan:

- a. Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut.
- b. Untuk memberikan fasilitas perpajakn kepada wajib pajak tertentu demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

2.19 Tarif Pajak Penghasilan

Dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*). UU pajak penghasilan menganut pendekatan tarif berbeda antara tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan tarif pajak untuk badan.

PPh terutang dari suatu wajib pajak dalam suatu tahun pajak untuk wajib pajak dalam Negeri (badan dan orang pribadi) dan wajib pajak luar Negeri yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dihitung dengan menerapkan tarif utama pajak dikalikan terhadap penghasilan kena pajak.

Tarif umum pajak menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 adalah sebagai berikut:

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,-	5% (lima persen)
Rp50.000.000,- s/d Rp250.000.000,-	15% (lima belas persen)
Rp250.000.000,- s/d 250.000.000,-	25% (dua puluh lima persen)
Rp500.000.000,-	30% (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2.20 Definisi Pajak Di Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-usyra atau Al-maks atau juga bisa disebut Adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau juga bisa disebut Al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan tanah secara khusus.

Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum, pent) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.” (Syifa’ul Ghalil hal.234, dan Ghiyats al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmi hal.275).

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang dilakuka kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harifah tidak dijelaskan dalam Al-qur’an maupun dalam Sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia.

Ada beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya adalah :

- a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
- b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)

c. al-'Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam)

Yang di maksud dengan jizyah adalah *kepala* yang di pungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib di tunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkanoleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana prasarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana tranportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang ditetapkan bersama.

Kharaj bermaksud cukai dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dalam undang-undang syariah, Kharaj ialah cukai ke atas tanah pertanian. Kharaj tidak disebut dalam [Quran](#) atau [Hadith](#) tetapi lebih kepada [ijma'](#) atau persepakatan ulama Islam dan sebahagian daripada tradisi islam atau [urf](#).

Dalam sejarah Islam, kharaj berupa duit yang dikenakan ke atas tanah yang telah dirampas daripada [Empayar Byzantine](#) dan [Sassanid](#), sama ada melalui peperangan atau damai. Jika perjanjian damai antara kaum Muslimin dan penduduk ini telah bersepakat mengatakan tanah tersebut adalah milik [Daulah Islamiyah](#)(negara), dan mereka mengakuinya dengan membayar kharaj, maka mereka harus menunaikannya. Kharaj menurut bahasa bermakna al-kara' (sewa) dan al-ghullah (hasil). Setiap tanah yang diambil daripada kaum kuffar dengan cara paksa, setelah diumumkan perang ke atas mereka, maka tanah teresbut dikategorikan sebagai tanah kharajiyah. Walaupun mereka masuk

Islam selepas penaklukan itu, namun tanah tersebut statusnya masih tanah kharajiyah.

Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Al-Amwal dari Az-Zuhri yang mengatakan : " *Rasulullah s.a.w menerima jizyah daripada orang Majusi Bahrain.*" Az-Zuhri menambah lagi: "*Siapa sahaja di antara mereka yang memeluk Islam, maka keIslamannya diterima, dan keselamatan diri dan hartanya akan dilindungi melainkan tanah. Kerana tanah tersebut adalah tanah fai' (rampasan) bagi kaum Muslimin, kerana orang itu tidak menyerah diri sejak awal, sehinggalah dia terlindungi.*"Maksudnya sehingga mereka di lindungi oleh kaum Muslimin.

Adapun yang dimaksud Usyur adalah apa yang diambil oleh petugas Negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah islam, sehingga usyur ini lebih serupa dengan apa yang dikenal pada masa sekarang ini dengan istilah "bea cukai"

Usyur adalah bentuk plural dari kata *usyr*, artinya sepersepuluh (10%). Dinamakan demikian karena ia diambil dari pedagang yang muslim sebanyak seperempat dari (10%) atau 2,5%, sedangkan kafir dzimmi diambil setengah dari 10% (5%). Dan dari kafir harby diambil 10% penuh. Tidak samar lagi meskipun apa yang diambil dari pedagang muslim dengan nama usyr, namun berbeda-beda dalam penilaiannya sebagai zakat yang ditetapkan secara nash tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Lain halnya dengan Usyr yang ditetapkan bagi pedagang non muslim, maka ia tunduk kepada ijtihad .